

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2018

JL. PERWIRA NO. 184 BELAKANG BALOK BUKITTINGGI

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi Tahun 2018 . Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap SKPD setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Kerja ini terkait erat dengan Renstra Dinas P3APPKB tahun 2016 – 2021 karena menjadi dasar dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya Rencana Kerja ini berisi

Kondisi Umum, Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja Tahun 2017 serta memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2018. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB tahun 2018.

Disadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam Renja ini, dan masih diperlukan penyempurnaan. Untuk itu kepada semua pihak, kami harapkan saran dan masukan, demi kesempurnaan Renja ini, untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik. terima kasih

**Kepala Dinas P3APPKB
Kota Bukittinggi**



TATI YASMARNI, SE.MM

NIP. 196306291983022001

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
 Bab I	 Pendahuluan	 1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	10
	1.4 Sistematika Penulisan	10
 Bab II	 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	 12
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	12
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	38
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	43
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	47
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
 Bab III	 Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	 59
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	59
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	60
	3.3 Program dan Kegiatan	60
 Bab IV	 Penutup	 78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Struktur Organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai urusan wajib ***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*** serta ***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***. Dinas P3APPKB mengawal berbagai fungsi kodrat hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki – laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa (termasuk didalamnya hak berperan dan pengambil manfaat pembangunan) penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan jaminan setiap warga Negara Indonesia berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Output nya tentu kehidupan keluarga akan kuat utuh dan rukun, hidup aman, tentram dan damai, yang menjadi landasan kokohnya sebuah negara, dan lebih dari itu, kondisi ini tentu idaman setiap orang termasuk didalamnya peningkatan ekonomi perempuan, jaminan hukum terhadap perempuan dan hak berpolitik perempuan

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional atau sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Kebijakan PUG dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa : Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan , pelaksanaan , monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

Dan secara umum tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh akses, kontrol, Partisipasi dan memperoleh manfaat yang sama atas pembangunan. Sehubungan dengan itu, di Kota Bukittinggi telah dikeluarkan SK Walikota nomor: 188.45-96-2015. tentang pembentukan kelompok kerja Pengarusutamaan gender Kota Bukittinggi tahun 2015-2019 yang bermaksud memastikan pengarusutamaan gender berjalan dengan baik di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 24 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

Demikian juga halnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara mikro berdampak kepada kuantitas penduduk dan kualitas hidup individu. Secara makro Program keluarga Berencana (KB) berdampak kepada pembangunan dan pencapaian pembangunan secara keseluruhan. Tegasnya dilihat secara Mikro, Keluarga Berencana (KB) berkaitan dengan kesehatan (kualitas ibu / perempuan), juga kualitas bayi dan anak. Secara Makro, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meraih Sustainable Developments Goals (SDGs) yaitu : 1) *memberantas kemiskinan dan kelaparan*, 2) *mewujudkan pendidikan dasar untuk semua*, 3) *mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan*, 4) *mengurangi angka kematian anak*, 5) *meningkatkan kesehatan ibu*, 6) *memerangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya*, 7) *menjamin kelestarian lingkungan hidup*, dan 8) *pembangunan kemitraan global untuk pembangunan*.

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi Keluarga Berencana juga membuka “ a window of opportunity “ (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat

melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (*dependency ratio*).

Sebagai salah satu kebijakan Pembangunan di Kota Bukittinggi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang sejahtera, disamping Program Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya Grand Design Kependudukan dengan Keputusan Walikota No 25 Tahun 2014 tentang Grand Design pengendalian kuantitas penduduk Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2035 untuk dipedomani dalam Rencana Kerja dan Program lainnya. Ada 5 (lima Grand Design kependudukan yang menyangkut aspek pembangunan kependudukan yaitu :

- (1) Grand desain Pengendalian Kuantitas Penduduk dibuat dan di desain pemerintah dengan BKKBN sebagai Instansi Utamanya
- (2) Grand Desain Peningkatan Kualitas Penduduk yang dibuat dan didesain oleh Pemerintah dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan sebagai Instansi Utamanya
- (3) Grand Desain Pengarahan Mobilitas Penduduk yang dibuat dan didesain oleh Pemerintah dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai Instansi Utamanya
- (4) Grand Desain Pembangunan Keluarga
- (5) Grand Desain Data Base Kependudukan yang dibuat dan di desain oleh Pemerintah dengan Dinas Kependudukan bersama statistik sebagai Instansi utamanya

Sebelum terbitnya UU Nomor 52 Tahun 2009, program Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ditekankan kepada ***Pendekatan Mikro Kuantitatif Kependudukan***, dan dengan dikeluarkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 , saat ini Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan ***Pendekatan Mikro Kualitatif Kependudukan dan Pembangunan Keluarga***.

Program Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebelumnya Fokus kepada 3 (tiga) upaya pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yaitu : 1. Pendewasaan Usia perkawinan, 2. Pengaturan Kelahiran, 3. Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan keluarga.

Kedepan tantangan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana fokus kepada 9 (sembilan) upaya pokok yaitu : 1. Perencanaan kependudukan , 2. pengendalian kuantitas penduduk, 3. Penurunan angka kelahiran, 4. Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, 5. Mobilitas penduduk, 6. Penduduk rentan , 7. Pembangunan keluarga, 8. Penyediaan Data mikro Kependudukan dan Keluarga yang Up date.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan Pembangunan Keluarga.

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa , terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12 % dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88 %. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 51,25 % dan 8.857 anak perempuan atau 48,75 % . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88 %. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (15 s/d 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 14 s/d ≥ 65 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat komplek. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 4 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan

pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik (Terlampir kami lengkapi dengan hasil pendataan keluarga yang dapat dijadikan referensi program dan kegiatan yang wajib dilaksanakan, dalam upaya menghadapi bonus demografi).

Dikaitkan dengan penyebaran penduduk di Kota Bukittinggi, lebih jelas dapat kita lihat performanya sebagai berikut :Kecamatan Guguak Panjang adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 35.791 jiwa, namun adalah kecamatan paling padat dengan rata – rata kepadatan penduduk 6.601 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Mandiangan Koto Selayan adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 42.647 jiwa , namun kepadatan penduduknya adalah 4.105 jiwa/Km² , untuk Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh , jumlah penduduk 22.586 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 4.275 jiwa/Km².

Bila dikaitkan dengan Klasifikasi kepadatan penduduk yang membagi 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu :

1. Tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa / Km² kategori tidak padat
2. Tingkat kepadatan 51 – 250 jiwa / km² , kategori kurang padat
3. Tingkat kepadatan 251 – 400 jiwa / km² , kategori cukup padat
4. Tingkat kepadatan besar dari 401 jiwa / km² , kategori sangat padat

Dengan ferforma penyebaran penduduk seperti diatas, tegas telah mereferensi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, bahwa ke 3 Kecamatan berpendudukan sangat padat, namun apabila dibandingkan antar ke 3 kecamatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk merencanakan pembangunan fisik , sebaiknya tidak terkonsentrasi lagi di Kecamatan Guguak Panjang, tetapi harus ditarik ke Kecamatan Mandiangan Koto Selayan dan Kecamatan Aua Birugo Tigo baleh, yang luas wilayah dan kepadatan penduduknya masih kurang dibanding kecamatan Guguk Panjang, walaupun secara klasifikasi kepadatan penduduk, ke dua kecamatan tersebut juga sudah sangat padat .

Disisi lain dari segi Kinerja Keluarga Berencana, laju pertumbuhan penduduk(LPP) Kota Bukittinggi tahun 2015 berada diposisi 1,77 sedangkan ditahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi mentargetkan Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi 1,71 dan tahun 2017target diposisi 1,68. Apabila dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Pendudukyaitu :

1. **TingkatKelahiran Anak/Total Fertility Rate (TFR)** , saat ini TFR Kota Bukittinggi (Jumlah anak per wanita selama masa reproduksinya) adalah 2,3 % anak lahir hidup (Tahun 2015). Artinya Program dua Anak Cukup, sudah cukup baik , karena sebahagian besar Ibu yang

melahirkan di Kota Bukittinggi tahun 2015 hanya 2 orang dan masih ada sebahagian kecil yang lebih dari 2 (dua) .

2. **Mortalitas(AngkaKematian)**, dikarenakan keberhasilan pembangunan di Kota Bukittinggi Indeks Harapan Hidup di Kota Bukittinggi mencapai 71 tahun, Kesuksesan Angka Harapan Hidup ini, telah menyumbang kepada Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi setiap tahunnya.
3. **Migrasi ; untuk Kota Bukittinggi migrasi yang terjadi adalah inimigration**(masuknya penduduk dari daerah lain ke Bukittinggi), baik untuk kepentingan ekonomi, kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan dan lain – lain, telah sangat berpengaruh kepada Laju Pertumbuhan Pendudukan di Kota Bukittinggi.

Dari 3 (tiga) factor tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi tetap akan berusaha menekan TFRmenjadi 2 dan mempertahankan Indeks Harapan Hidup yang sudah baik dengan program lansia sehat dan mandiri . Namun untuk inimigrasi, sebagai dampak dari Bukittinggi sebagai Kota Tujuan wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan,perlu strategi khusus, agar tidak terlalu membebani Pemerintah Bukittinggi dalam menjamin ketersediaan infra struktur jalan, sekolah, rumah, sumber air, konsumsi listrik, ketahanan pangan, fasilitas kesehatan dan lain lain . Untuk itu perlu dukungan lintas sektoral dan lintas program untuk menangani Laju Pertumbuhan penduduk, sehingga kolaborasi dan integrasi program adalah jawaban dari permasalahan LPP

Kinerja Program Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berada di kuadran ke 3 (tiga) yaitu kuadran yang memperlihatkan posisi Kota Bukittinggi sebagai berikut ; Total Fertility Ratenya rendah (2,3) dan Contraceptive Prevalence Rate rendah, yaitu Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi di Kota Bukittinggi sebesar 54,95 % (Tahun 2015). Dari Segi Tingkat Kelahiran rendah sudah baik, namun penggunaan alat kontrasepsi yang rendah, masih merupakan masalah yang perlu ditindak lanjuti. Rendahnya pemakaian alat kontrasepsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ber-KB menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Bukittinggi belum maksimal , yaitu 37,30 % (Tahun 2015), seperti Vasek Tomi (Medis Operasi Pria/MOP) , Tubek Tomi (Medis Operasi Wanita/MOW) , IUD dan Implan. pemakaian alkon non MKJP seperti kondom, suntik dan pil, tingkat drop outnya cukup tinggi. Hal ini perlu dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tenaga Medis, terutama pasca melahirkan dan pasca keguguran .

- b. Presentase PUS yang tidak ingin anak lagi akan tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (Unmet need) di Kota Bukittinggi 16,15 % masih tinggi, dengan berbagai alasan antara lain takut resiko pemakaian alkon dan memilih metode tradisional tanggal, hal ini dikhawatirkan gagal hasil. Hal ini juga perlu dukungan KIE dari tenaga medis dan ahli .
- c. Keputusan Umur Menikah Pertama Remaja tinggi, sehingga pemakaian alkon terpengaruh . Kecendrungan Remaja di Kota Bukittinggi, menyelesaikan pendidikan dan bekerja terlebih dahulu baru menikah.

Dari ketiga faktor diatas, maka dukungan para pihak sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat , ditambah keberpihakan kebijakan dan anggaran daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang panduan Pengembangan Kota layak Anak
19. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan kampung Keluarga Berencana
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi;
27. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak ;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 ;
29. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi .
31. Keputusan Walikota No 25 Tahun 2014 tentang Grand Design pengendalian kuantitas penduduk Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2035
32. Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No 188.45/PPKB/IX-2016 tahun 2016 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
33. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RenjaDinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 berkaitan dengan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kependudukan Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPB) , yang akan dikerjakan secara riil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditahun 2018 dengan target yang sudah ditetapkan.

Tujuan :

Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2018 secara umum adalah untuk menyiapkan materi program dan kegiatan sebagai muatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2018 dibidang Pengarus utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga , untuk memastikan manfaat pembangunan dibidang perempuan , anak. Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga tercapai dengan baik dan sesuai target.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2016 – 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kerja (*performance plan*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

4 klasifikasi penilaian, yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“sangat baik ”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sd 100% predikatnya **“baik ”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sd 85% predikatnya **“sedang ”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sd 70% predikatnya **“kurang baik ”**

Berikut ini Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2017 per sasaran :

Sasaran 1	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja kegiatan sasaran nomor 1 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Fasilitasi dan Perkuatan organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	50 organisasi	50 organisasi	96,80
2	Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu)	Jumlah Lomba dan Peringatan Hari Ibu terlaksana	2 lomba dan 1 hari puncak peringatan HAN	2 lomba dan 1 hari puncak peringatan HAN	95,46
3	Penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah PKK yang dibina, Lomba PKK, Jambore Kota dan Jambore Tingkat Propinsi yang terlaksana	3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan.	3 Kecamatan, 4 Lomba, 2 Kegiatan.	87,84
4	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	98,00
5	Penguatan ekonomi perempuan rentan melalui KIE pelatihan, pemberian bantuan dan pameran	Jumlah Perempuan Rentan Yang dibina	30 orang	30 orang	98,73
6	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Kelompok P2WKSS yang dibina	1 (satu) Kelompok/ kelurahan	1 (satu) Kelompok/ kelurahan	97,63
7	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak melalui Pembentukan Kelurahan Ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak yang difasilitasi dengan petugas zona selamat sekolah, advokasi dan evaluasi Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi	1 (satu) Kelurahan 150 orang	1 (satu) Kelurahan 150 orang	93,52

8	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan terkait program PP dan PA	33 orang,1 kali	33 orang,1 kali	98,54
---	---	--	-----------------	-----------------	-------

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja kegiatan (output) dari 8 kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	100%	Sangat baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	8
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0
-	Jumlah	-	6

Dengan demikian semua indikator dalam kategori ini baik.

Sasaran 2	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja kegiatan pada sasaran nomor 2 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, Jumlah KDRT yang mendapat pendampingan, Jumlah kasus yang ditangani.	30 Org Pengurus dan relawan, 20 kasus terselesaikan	30 Org Pengurus dan relawan, 20 kasus terselesaikan	94,73

2	Fasilitasi pembentukan dan perkuatan lembaga pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Lembaga yang terbentuk	1 satgas, 4050 data, 2 pertemuan	1 satgas, 4050 data, 2 pertemuan	92,57
3	Forum koordinasi penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi dan trafficking	Jumlah Forum Koordinasi terlaksana	1 kali pertemuan teknis, 2 kali FGD, 7 Kali pendampingan	1 kali pertemuan teknis, 2 kali FGD, 7 Kali pendampingan	92,52
4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang KDRT dan TPPO	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	50 peserta	50 peserta	94,84

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja kegiatan (output) dari 4 kegiatan pada sasaran 2 adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	100%	Sangat baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	4
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0
-	Jumlah	-	4

Dengan demikian semua indikator dalam kategori ini baik.

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana
-----------	--

Analisis pencapaian target indikator kinerja kegiatan (Output) pada sasaran nomor 3 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Pelayanan KIE/ Teknik motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah Kelurahan yang di KIE melalui media cetak maupun elektronik	24 kali KIE, 12 kali liputan, cetak, 1 kali liputan elektronik	24 kali KIE, 12 kali liputan, cetak, 1 kali liputan elektronik	99,01
2.	Manunggal KB Kes.	Terlaksananya operasional manunggal KB-KS	5 Kali	5 Kali	98,44
3.	Pelayanan KB Serentak	Jumlah masyarakat yang dilayani KB	1829 orang	1829 orang	94,00
4.	Pemberian Penghargaan KB Teladan	Pemenang lomba dan penghargaan KB teladan	10 Jenis lomba	10 jenis lomba	98,36
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana)	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	3 Balai Penyuluh KB	3 Balai Penyuluh KB	78,78
6.	Operasional Penyuluh KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017	Terlaksananya Peningkatan kinerja PLKB	11 orang	11 orang	100
7.	DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010-2015)	Gudang, mobil, alakon, genre, kit, obgyn bed, IUD kit dan sterilisasi elektrik, AC	1 Gudang, 1 mobil, alakon, 5 genre, kit, 10 obgyn bed, 23 IUD kit dan sterilisasi elektrik	1 Gudang, 1 mobil, alakon, 5 genre, kit, 10 obgyn bed, 23 IUD kit.	58,68

8.	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah PPKBK, Sub PPKBK dan kader yang dibayar	390 orang	390 orang	97,90
9.	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah Peserta KB baru MKJP	291 orang	291 orang	82,10
10.	Pelaksanaan/Peringatan Harganas Kota, Propinsi dan Nasional	Jumlah Kegiatan terlaksana	3 kali	3 kali	95,98
11.	Jambore Program KKBPK	Jumlah Jambore yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	95,59
12.	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	Jambore Kader IMP dan PLKB terpadu	36 orang	36 orang	95,59
13.	Fasilitasi/Pelaksanaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	1 kampung KB	1 kampung KB	98,19
14.	Penunjang Operasional Klinik KB	Klinik KB yang berfungsi	25 klinik	25 klinik	95,11
15.	Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Jumlah Peserta pelatihan KRR bagi Pendidik sebaya dan konselor	90 Orang	90 Orang	100
16.	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah peserta Pemilihan duta pelajar/ mahasiswa Generasi Berencana (Genre), pengayom, motivator dan kreator Genre	54 orang,3 kali	54 orang,3 kali	96,16
17.	Pelatihan KRR bagi Guru BK dan OSIS Tingkat SLTA terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS	Terlaksananya pelatihan KRR bagi guru BK dan pengurus PIK remaja Tk.SLTA	110 Orang	110 Orang	100
18.	Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK	6 kali	6 kali	94,77

19.	Fasilitasi & Pelatihan kader Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	Jumlah Poktan terbentuk / dibina	222 orang,4 Poktan	222 orang,4 Poktan	95,72
20.	Pembentukan dan Pendampingan Poktan	Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk dan didampingi	72 kelompok	72 kelompok	90,48
21.	Kancah Bhakti Saka Kencana	Peserta yang mengikuti Saka Bhakti Kencana	35 orang	35 orang	96,46
22.	Promosi gelangang dagang kelompok UPPKS	jumlah pameran promosi gelangang yang diikuti	3 kali	3 kali	94,97

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja kegiatan (output) dari 22 indikator sasaran Strategis nomor 3 adalah berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1.	100%	Sangat baik	3
2.	85% sd < 100%	Baik	16
3.	70% sd < 85%	Sedang	2
4.	0 sd < 70%	Kurang Baik	1
5	Jumlah	-	22

Dengan demikian pencapaian sasaran 3 dengan prediket baik adalah sebanyak 3 kegiatan dengan predikat sangat baik, 16 indikator dan prediket sedang adalah sebanyak 2 indikator, satu kegiatan kurang baik yaitu DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010-2015) , satu target yang tidak terealisasi karna kebutuhan tersebut tidak tersedia pada menu DAK

Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk
-----------	---

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran nomor 4 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Penunjang Kegiatan Pendataan / updating pendataan Keluarga	Jumlah peserta orientasi pendataan, pencatatan dan pelaporan, Jumlah KK yang terdata, Jumlah peserta sarasehan	225 orang	225 orang	97,31
2.	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah analisa kependudukan yang direkomendasikan	1 dokumen	1 dokumen	89,45
3.	Sarasehan hasil Pendataan/updating data Keluarga	Sarasehan hasil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	82,69
4.	Sosialisasi / Grand Design Peningkatan Kualitas Penduduk	Peserta sosialisasi Grand Design kualitas kependudukan	130 orang	130 orang	95,99
5.	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB	Jumlah Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan	200 orang	200 orang	99,04
6.	Orientasi Petugas Pendataan/updating pendataan Keluarga	Peserta orientasi petugas pendataan keluarga	200 orang	200 orang	99,88

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja (output) dari 6 kegiatan pada sasaran 4 adalah berikut :

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1.	100%	Sangat baik	0
2.	85% sd < 100%	Baik	5
3.	70% sd < 85%	Sedang	1
4.	0 sd < 70%	Kurang Baik	0
5	Jumlah	-	6

Dengan demikian pencapaian sasaran 4 dengan prediket baik adalah sebanyak 5 indikator dan prediket sedang adalah sebanyak 1 indikator .

Sasaran 5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
-----------	---

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran nomor 5 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%	Ket.
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang terbeli	705 buah	705 buah	100	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	3 rekening	3 rekening	100	
3.	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7 jenis	7 jenis	100	
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta	5 kendaraan R4 dan 27 kendaraan R2	5 kendaraan R4 dan 27 kendaraan R2	100	

		pajak yang terbayarkan.				
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	22 macam dan 2 orang tenaga kebersihan	22 macam dan 2 orang tenaga kebersihan	100	
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	31 macam	31macam	100	
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6macam	6 macam	100	
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli	7Macam	7 Macam	100	
9.	'Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan yang tersedia	50 item	50 item	100	
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	600 paket	600 paket	100	
11	Rapat-rapat koordinasi,konsultasi,so sialisasi dan perjalanan dinas ke luar kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	12 bulan	12bulan	100	
12	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	3 Orang	3orang	100	
13	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	5 buah spanduk	5buah spanduk	100	
14	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan jasa pemerintah	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	10 orang	10 orang	100	

15.	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	1 Printer, 1 set Mebeuler, 1 CCTV, 1 Papan Merk Kantor	1 Printer, 1 setMebeuler, 1CCTV, 1 Papan Merk Kantor	100	
16.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Kantor	1 Kantor	100	
17.	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit	10 orang	10 orang	100	
18	Penyusunan rencana kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100	
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100	
20	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100	
21	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran (output) dari 21 indikator sasaran strategis nomor 6 adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	100%	Sangat Baik	21
2	85% sd < 100 %	Baik	0
3	70 % sd < 85 %	Sedang	0
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0
-	Jumlah	-	21

Dengan demikian pencapaian sasaran nomor 6 dengan predikat sangat baik (100%) adalah sebanyak 21 indikator.

Dari seluruh indikator pencapaian sasaran nomor 1 s/d 6, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,` Keluarga Berencana tahun 2017 baik, terbukti dengan persentase capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 93 % keuangan dan hampir seluruh kegiatan secara fisik capaiannya 90 %. Hal ini lebih disebabkan oleh harmonisasi dan kerja keras team, walaupun faktor kelembagaan, tetap dirasakan sangat berat untuk melaksanakan 2 (dua) urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.1.

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d TW II Tahun 2017		Capaian Target Renstra s.d TW II Tahun 2017	
										Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.01.01.			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	01	1.01.01.			NON URUSAN								
1	01	1.01.01.	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	100%					
1	01	1.01.01.	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	100%	3 macam	100%	47%	100%	47%
1	01	1.01.01.	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	100%	4 rek x 12 bln=48 bln	48%	9%	48%	9%

1	01	1.01.01.	01	03	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	computer,laptop	100%					
1	01	1.01.01.	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang, service dan BBM, pajak kendaraan	5 Kendaraan R4,27 kendaran R2	100%	3 kendaraan R4,20 R2	58%	19%	58%	19%
1	01	1.01.01.	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan, bahan pembersih yang tersedia		27 macam	21 macam	55%	45%	55%	45%
1	01	1.01.01.	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis	31 macam	27 macam	28 macam	51%	27%	51%	27%
1	01	1.01.01.	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 macam	6 macam	6 macam	74%	34%	74%	34%
1	01	1.01.01.	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik	7 macam	7 macam	7 macam	50%	57%	50%	57%
					Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	bahan bacaan, referensi dan peraturan perundang undangan	50 item		100 item	50%	0%	50%	0%
1	01	1.01.01.	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum	Makan dan minum	80%	1 tahun	76%	26%	76%	26%
1	01	1.01.01.	01	18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	80%	1 tahun	87%	38%	87%	38%
1	01	1.01.01.	01	21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tenaga administrasi, supir dan penjaga malam	3 orang	3 orang	3 orang	50%	25%	50%	25%
					Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Spanduk	5 Spanduk	3 Spanduk	15 spanduk	60%	0%	60%	0%
1	01	1.01.01.	01	31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor, pejabat/penitia pemeriksa hasil pekerjaan	7 orang	1 Tahun	7 org	41%	0%	41%	0%

1	01	1.01.01.	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	80%						
0	0	0	0	09	Pengadaan Peralatan Kantor	printer,mesin penghancur kertas,brankas,mebeul air	2 Printer,2 mesin penghancur kertas,1 brankas,mebeuler, membeli brankas printer	7 Jenis	6 jenis	100%	16%	100%	16%	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang aman	1 kantor	1 unit	1 kantor	100%	0%	100%	0%	
0	0	0	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemenuhan kopetensi PLKB sesuai dengan jenjang fungsional	100%	3%						
0	0	0	05	11	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Terlaksananya penilaian kinerja petugas PLKB	10 org	100%		82%	0%	82%	0%	
1	01	1.01.01.	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sinkronisasi Renja dengan RKPD	100%	80%						
1	01	1.01.01.	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	78%	0%	78%	0%	
1	01	1.01.01.	06	05	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Tersusunnya Renja dan Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	79%	0%	79%	0%	
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	laporan Keuangan Akhir Tahun berjalan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	0%	0%	
0	0	0	0	07	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	69%	0%	69%	0%	
					WAJIB									
					URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	persentase penurunan kasus KDRT dan TPPO	18 kelurahan	50%					
					Fasilitasi penguatan kota layak anak melalui pembentukan kelurahan ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak yang difasilitasi dg petugas zona selamat sekolah,advokasi dan evaluasi kota layak anak di bukittinggi	1 keluraha,150 org	2 keg	31 indikator KLA	92%	85%	92%	85%
					Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah pengurus FORDA yang didampingi,mengikuti peringatan HAN	33 orang,1 kali	2 keg	-	100%	65%	100%	65%
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan	80%	68%					
					Penguatan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Peserta pelatihan,pelayanan dan pendampingan korban KDRT bagi pengurus dan relawan P2TP2A serta penyelesaian pengaduan perlindungan Perempuan dan anak	30 orang pengurus dan relawan, 20 kasus diselesaikan	70%	24 kelurahan,kec kota	71%	50%	71%	50%
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase meningkatnya kesejahteraan perempuan	15%	-					

					Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE Pelatihan, Pemberian Bantuan dan Pameran	Jumlah perempuan yang dibina	30 orang	-		100%	62%	100%	62%
					Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah kelompok P2WKSS yang dibina	1 Kelompok/kelurahan	-		60%	20%	60%	20%
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun		4%					
					Fasilitasi dan perkuatan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	50 organisasi perempuan	1 organisasi GOW	25 org perempuan	69%	4%	69%	4%
					Fasilitasi Peringatan Hari Ibu	Lomba dan Peringatan Hari Ibu	2 lomba dan 1 hari puncak Peringatan Hari Ibu	2 keg		1.22%	0%	1.22%	0%
					Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	PKK yang dibina, Jambore Kota yang dilaksanakan, Lomba PKK, Jambore Tingkat Propinsi yang diikuti	3 kecamatan, 1 kegiatan Jambore Kota, 4 lomba, 1 kegiatan Jambore Propinsi	-		77%	70%	77%	70%
					Jambore PKK Tingkat Kota	Jambore PKK berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat	1 kegiatan	-		0%	0%	0%	0%
					Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB	68%	62%					

					Pelayanan KIE/Teknik Konseling Program KB/KS	Terlaksananya KIE /teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik	24 kali KIE, 12 kali Lliputan,cetak, 1 kali liputan elektronik	32 kali	3 keg	82%	4%	82%	4%
					Kancah Bhakti Saka	Peserta yang mengikuti Bhakti Saka Kencana	35 org	1 Kali	17 org	0%	0%	0%	0%
					Manunggal KB Kes	Operasional Manunggal KB Kes	5 kali	5 keg	5 keg	70%	20%	70%	20%
					Pelayanan KB Serentak	Jumlah peserta KB	1829 orang	5 kali		86%	80%	86%	80%
					Pemberian Penghargaan KB Teladan	Perlombaan yajg dilaksanakan	10 jenis lomba	10 jenis	4 jenis	100%	60%	100%	60%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK 2017)	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penyuluh KB	3 Balai Penyuluh KB			50%	0%	50%	0%
					Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017)	Terlaksananya peningkatan kinerja PLKB	10 orang	6 paket	1 keg	50%	13%	50%	13%
					DAK Bidang KB (sis DAK 2010-2015)	Gudang, mobil alkon, genre KIT, obgyn bed, IUD KIT dan sterilisator elektrik, AC	1 Gudang, 1 mobil alkon,5 genre KIT, 10 obgyn bed, 23 IUD KIT dan sterilisator elektrik, AC	-		51%	10%	51%	10%

					Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta kader	Pemberian honorarium PPKBK dan SUB PPKBK serta kader	390 orang	354 org	-	100%	0%	100%	0%
					Penunjang Operasional IUD Implant dan Kader KB	Jumlah peserta KB baru yang MKJP	291 orang	800 org	390 org	68%	20%	68%	20%
					Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga	Tersedianya penunjang kegiatan pendataan keluarga (kader pendataan keluarga aktif)	225 orang	1 kali	1 keg	4%	15%	4%	15%
					Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS	Pameran dagang yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	-	100%	25%	100%	25%
					Peringatan HARGANAS Kota, Propinsi dan Nasional	Peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kota, propinsi dan nasional	3 kali	3 kali	3 keg	100%	0%	100%	0%
					Jambore Program PPKBK	Jambore yang dilaksanakan (Petugas KB berprestasi)	1 kali	15 org	2 keg	0%	0%	0%	0%
					Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Tersedianya buku analisa kependudukan	1 dokumen		1 keg	35%	25%	35%	25%
					Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	Jumlah kader IMP dan PLKB terpadu	36 orang		-	21%	0%	21%	0%
					Fasilitasi Kampung KB	Kampung KB yang dibina	1 kampung KB			48%	0%	48%	0%

					Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga	Sarasehan Hasil Pendataan Tahun 2017	4 kegiatan	4 keg	1 keg	0%	0%	0%	0%
					Sosialisasi/ Grand design Pengendalian Kualitas Penduduk	Peserta sosialisasi grand design kependudukan	130 orang		1 keg	0%	0%	0%	0%
					Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB	Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan	200 orang	1 kali	1 keg	0%	0%	0%	0%
					Orientasi Petugas Pendataan Keluarga	Peserta orientasi pendataan keluarga	200 orang	1 kali	1 keg	100%	15%	100%	15%
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki PIK/R/M	132 siswa						
					Pelatihan KRR Bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Peserta pelatihan KRR bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya	90 orang, 30 PIK R/M, 132 siswa	132 siswa	PIK R/M saka kencana, Genre SKB	100%	95%	100%	95%
					Fasilitasi Program Generasi Berencana	Pemilihan Duta pelajar/mahasiswa Generasi Berencana, pengayom, motivator dan kreator Genre	54 org, 3 kali. Tumbuh 20, Tegak 16 dan Tegar 4			100%	100%	100%	100%
					Pelatihan KRR Bagi Guru BK dan OSIS Tk.SLTA Terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS	Peserta pelatihan KRR bagi Kepala Sekolah dan guru. Peningkatan PIK R/M	110 orang. Tumbuh 20, Tegak 16 dan Tegar 4	132 pembina		100%	30%	100%	30%

					Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK	6 Kali	8 kali	3 keg	51%	0%	51%	0%
					Program Pelayanan Kontrasepsi	Presentase pemakaian Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28%						
					Penunjang Operasional Klinik KB	Klinik KB yang berfungsi	25 klinik		klinik	30%	0%	30%	0%
					Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Peningkatan dan tingkatan tahapan kelompok kegiatan (POKTAN) yang dibentuk	Tingkat Tahapan Berkembang						
					Fasilitasi dan Pelatihan Kader POKTAN (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)	Peserta pelatihan dan POKTAN yang difasilitasi	222 org, 4 poktan			100%	33%	100%	33%
					Pembentukan dan Pendampingan POKTAN	Jumlah POKTAN yang dibentuk dan didampingi	72 kelompok			100%	37%	100%	37%

Bukittinggi, 22 Juni 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB



TATI YASMARNI, SE.MM

NIP..196306291983022001

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus diakui masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, terutama pada :

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber daya Manusia Aparat tidak memadai
2. Dukungan Anggaran sangat kecil
3. Tidak cukupnya ruangan untuk layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
4. Integrasi program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Program KKBPK antar SKPD masih lemah.

B. Pemecahan masalah

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Mengusulkan permintaan tambahan Pegawai kepada Pimpinan.
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam setiap pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dengan melakukan mutasi internal, dan kegiatan yang bersifat kota dan provinsi dilakukan dengan kerjasama antar bidang.
3. Membuat perencanaan anggaran sejelas jelasnya, dan mengupayakan penjelasan lebih kepada TAPD, sehingga dapat dilakukan penambahan anggaran belanja Dinas P3APPKB.
4. Mengupayakan pembelanjaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN , dana cukilan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan yang dibelanjai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat dan dari Kementerian PPPA Republik Indonesia.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga setiap aparat yang ada memahami tugas pokok dan fungsi masing masing terutama pemahaman terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang diterjemahkan

kepada Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Pemanfaatan fasilitas Dinas secara efektif dan efisien, serta merencanakan alih fungsi garage Dinas untuk dijadikan gudang alat kontrasepsi.
7. Merelokasi ruangan yang ada, untuk dimanfaatkan sebagai ruang Assesment Pengaduan Pelanggaran Hak Perempuan dan Anak, walaupun belum memenuhi SOP yang ada.
8. Melakukan pendekatan formal dan non formal dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, agar mendapat dukungan program.

Dari upaya pemecahan masalah diatas, hal yang belum dapat dilakukan dan butuh dukungan pimpinan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Penambahan ASN laki-laki : 2 orang
- b. Perlu rekomendasi Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Pemerintah

Pusat untuk melakukan penambahan Pejabat fungsional Keluarga Berencana

- c. Perlu penambahan personil sesuai kompetensi tupoksi Dinas

P3APPKB seperti :

1 orang psikolog perempuan

1 orang psikolog anak

1 orang sarjana akuntansi

2 orang tenaga SLTA

1 orang tenaga kebersihan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan ini merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian kinerja pada sasaran tersebut sebagaimana uraian berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasarn	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.	Persentase Perempuan di Legislatif	Persentase	8 %	8%	100%
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase	54,63%	54,63%	100%
		Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Kategori	Pratama	Pratama	100%
2	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	7,9	4,24	186,32
		Rasio kekerasan terhadap anak.	Rasio	13,09	13,09	100%
3	Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase	68%	63,79%	93,81 %
		Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah	96	96,04	100%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	Persentase	20%	20%	100%

1. Bertambahnya pemahaman masyarakat (terutama perempuan mengenai Pengarusutamaan Gender/PUG dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT) membuktikan kinerja dibidang ini telah baik. Realisasi dari indikator sasaran penurunan kasus KDRT,

- penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ternyata mencapai target yang ditetapkan dan dengan pencapaian “sangat baik”, hal ini disebabkan karena semua pengaduan yang diterima dapat diproses dan diselesaikan dengan baik.
2. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak, juga membuktikan kinerja bidang peningkatan kualitas perempuan dan anak sudah semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan Pencapaian indikator sasaran Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi perempuan sangat baik, walaupun secara total, kondisi ini masih perlu ditingkatkan, ini karena ada nya peningkatan kualitas perempuan, sehingga peran serta perempuan dalam organisasi baik pemerintah maupun organisasi perempuan lainnya semakin meningkat jumlahnya, walaupun belum sampai 30 %.
 3. Keberanian Pemerintah Kota Bukittinggi melaunching Bukittinggi Kota menuju Layak Anak tanggal 4 Mei 2015 yang lalu yang diikuti dengan pengakuan dan penganugerahan Kota Bukittinggi sebagai Kota menuju Layak anak oleh Pemerintah Pusat, telah membuktikan program perlindungan dan pemenuhan 31 indikator hak anak, telah semakin baik di Kota Bukittinggi. Dilain pihak Komitmen untuk menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Layak anak telah dilakukan dengan beberapa langkah dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi. bahkan Walikota Bukittinggi telah mengeluarkan Instruksi Walikota No.188.45-95-2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Kota Layak Anak walaupun dirasakan tindakan nyata dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dirasakan belum maksimal. seperti perwujudan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, pesantren ramah anak dan Kelurahan ramah anak belum dapat dilaksanakan sesuai harapan, dan bahkan pelanggaran hak anak masih tinggi, dan sex menyimpang anak – anak terjadi hampir diseluruh kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi bahkan di tempat-tempat yang seharusnya sudah memiliki standar ramah anak. Kenyataan ini membuat Dinas P3APPKB, harus bekerja keras, menggandeng semua pengambil kebijakan, untuk bergerak bersama menanggulangi dan menghentikan ini semua sesuai dengan salah satu motto pada Three Ends yaitu, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan Anak
 4. Pada Tahun 2016 Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya sebagai Kota yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 5. Pada tahun 2017 ini kembali Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak anak.

6. Secara umum capaian indikator sasaran pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah tercapai dengan sangat baik, kesetaraan gender dalam hal program KB terhadap laki – laki masih perlu ditingkatkan . Pemahaman program KB belum total, sehingga image bahwa program KB hanya untuk perempuan masih belum berubah, Untuk itu secara spesifik program KB Pria menjadi prioritas utama untuk digarap kedepan.
Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metoda primadona pada program KKBPK, Dinas P3APPKB berhasil melaksanakan KIE dan eksekusi medis kepada akseptor dengan baik.
7. Sasaran tersedianya database mikro kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat tercapai dengan baik, dibuktikan dengan ketersediaan beberapa data strategis dibidang program KKBPK sebagai berikut :
 - a. Tersedianya Jenis data KB
 - b. Tersedianya data demografi
 - c. Tersedianya data keluarga sejahterapeserta KB , Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I

Data ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)

a. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi :

1. Pengarusutamaan gender
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
3. Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum

perempuandan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan telah dapat diproses dan diselesaikan dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, apalagi tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat, termasuk belum kuatnya Satuan Tugas Perlindungan Anak yang sudah dibentuk diseluruh Kecamatan dan diseluruh Kelurahan di Kota Bukittinggi. Faktanya Kekerasan Seksual terhadap anak dan Sex menyimpang anak, masih ditaraf yang menakutkan dan mengkhawatirkan kita semua.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.227 orang atau 60,40% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 3.683 orang pegawai. Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30 %. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 s/d 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa , persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6 %, disatu pihak amanat Undang – Undang , mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi , tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah , bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Berikut rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	1.456 orang	2.225 orang	3.683 orang

Catatan : Apabila dibandingkan dengan jumlah perempuan usia kerja, perempuan yang bekerja disektor Pemerintah baru 7,5 %, padahal amanat undang – undang 30 %

Begitu juga keterlibatan perempuan di bidang politik masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya jumlah anggota DPRD Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan yaitu 2 orang atau 8% dari jumlah 25 orang anggota DPRD Kota Bukittinggi (lihat tabel di bawah ini)

Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin

Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	4
Partai Keadilan Sejahtera	3	0	3
Partai Amanat Nasional	3	0	3
Partai Golongan Karya	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
Partai Demokrat	2	2	4
Partai Bukittinggi Hebat	4	0	4
Jumlah	23	2	25

Dari komposisi tabel diatas, hanya partai Demokrat yang mengalokasikan perempuan pada strata pengambilan keputusan, bahkan mencapai 50 %, sedangkan partai politik lainnya, seakan tidak memihak kepada program pengarusutamaan gender, sehingga tidak satupun keterlibatan perempuan didalam partai dimaksud. Kondisi ini tentu memprihatinkan, dan

sebagai lembaga yang di anuti oleh masyarakat, partai politik di Kota Bukittinggi perlu memperbaiki citra dan keberpihakannya kepada perempuan, karena lembaga legislative seharusnya terdepan mendukung program pengarus tamaan gender

Secara keseluruhan, artinya program pengarus tamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Sosialisasi program pengarusutamaan gender dirasa cukup berjalan dengan baik melalui pelayanan teknis pembiayaan anggaran responsive gender telah disosialisasikan kepada seluruh SKPD. Sama halnya dengan komitmen Kota Layak Anak, pada kenyataannya belum seluruh SKPD membuat penganggaran dengan indikator yang lebih tajam dan jelas dan belum dilengkapi oleh GBS (Gender Budget Statement). Kondisi ini mengakibatkan Pembangunan yang dilaksanakan tidak berwawasan gender .

b. Urusan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Grand Design Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Design Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 belum dipedomani dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan Grand Design kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunankependudukan yaitu :

1. Pengendalian kuantitas penduduk
2. Peningkatan Kuantitas penduduk
3. Pengarahan mobilitas penduduk
4. Pembangunan Keluarga dan
5. Pembangunan data Base Kependudukan

Laju Pertumbuhan Penduduk berada di strata 1,71, yang disebabkan faktor inimigrasi sebagai akibat atau eksese dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat hinterland atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar , dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategipengembangan ekonomi dan peraturan daerah yang mengatur arus masuk manusia ke Bukittinggi yang mampu memprotek atau mengurangi pendatang, dengan kualitas SDM yang rendah. Karena faktanya, arus masuk manusia dari luar ke Bukittinggi untuk

bertempat tinggal dan mencari pekerjaan di Bukittinggi, lebih banyak berkontribusi kepada berbagai masalah social dan berdampak kepada lambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi .

Rata – rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km². Dan untuk Kecamatan Guguk panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km², sebuah kondisi kepadatan yang luar biasa, dan sudah memberi ekses negatif kepada masyarakat itu sendiri.

Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia sehat, tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai dan dilakukan secara bersama oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pembangunan di Kota Bukittinggi tidak berwawasan kependudukan, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi pertimbangan dan tidak merupakan prioritas program.

Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69, 16 %, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor inigrasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Masih belum terbinanya kelompok kegiatan dengan baik, dibuktikan dengan :

- Belum seluruh posyandu memiliki BKB.
- Belum seluruh posyandu Lansia memiliki BKL
- Belum seluruh sekolah SLTP dan SLTA memiliki PIKR
- Belum ada PIKR jalur Luar Sekolah
- Belum ada BKR di Sekolah
- Belum seluruh Kampus memiliki PIKM

- Belum seluruh kelurahan memiliki kelompok UPPKS
- Belum maksimal dukungan mitra kerja Koalisi kependudukan
- Belum maksimal dukungan mitra kerja Asosiasi Kelompok UPPKS
- Norma Keluarga Kecil bahagia sejahtera belum maksimal.

2.4 Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berikut review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Belanja Langsung				5,202,000,361		
Urusan : Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				772,966,450		
Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				48.085.500,-		
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional	Bukittinggi	1 kali	48.085.500	APBD	2 jenis lomba dilaksanak an dalam 1 rangkaian peringatan HAN
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak				271,519,450		

Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Fasilitasi P2TP2A	Bukittinggi		157.099.450	APBD	Semua kasus yang dilaporkan segera ditanggulangi
Forum Anak Daerah (Forda) Kota Bukittinggi	Fasilitasi Forum Anak Daerah (Forda)	Bukittinggi	1 kegiatan	69.500.000	APBD	
Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender	Bukittinggi	3 kali	44.920.000	APBD	
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				453,361,500		
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan terkait program PP dan PA	Bukittinggi	1 Organisasi	107.981.000	APBD	Terbina nya organisasi perempuan
Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini	Lomba dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Ibu serta terlaksananya Peringatan Hari Ibu.	Bukittinggi	2 kegiatan	210.315.500	APBD	Peringatan Hari Ibu sejalan dengan HUT Kota Bukittinggi dan PDRI serta Hari Kartini
Penguatan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya pembinaan di bidang pemasaran bagi pengusaha ekonomi mikro perempuan	Bukittinggi	40 Orang	55.565.000	APBD	adanya pembinaan dan pameran ekonomi mikro
Pengembangan Kota Layak Anak	Terlaksananya Sosialisasi Kota Layak Anak	Bukittinggi	75 Orang	79.500.000	APBD	Pengembangan Kota Layak Anak

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				3,803,243.611		
Program Keluarga Berencana				3,201,484,661		
Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Adanya promosi program kependudukan dan KB di media Radio, Talkshow, Liputan TV dan Mupen KB	Bukittinggi	24 kali, 12 kali, 1 kali liputan	34.643.000	APBD	Penyampaian informasi dan Program KB Nasional
Kancah Bhakti Saka Kencana	Terikutinya kegiatan kancah bhakti saka kencana bagi pengelola PIK Remaja	Bukittinggi	1 kali	38.370.000	APBD	Peningkatan wawasan GM
Manunggal Kb-Kes	Terlaksananya operasional manunggal KB-KS	Bukittinggi	5 kali	62.600.000	APBD	Koordinasi dalam penyuluhan dan pelayanan bhakti sosial TNI-KB, IBI-PKK an Bhayangkara
Perkemahan Kader IMP Tingkat Propinsi	Terikutinya perkemahan kader IMP, PLKB, dan PKK tingkat kota dan tingkat provinsi.	Luar Bukittinggi	2 kegiatan	61.040.000	APBD	Peningkatan wawasan pengetahuan kader IMP
Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS Tingkat	Terikutinya Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS Tk.	Luar Bukittinggi	3 kali	38.375.500	APBD	Meningkatnya peluang pasar hasil produksi

Nasional dan Tingkat Propinsi	Kota, Provinsi dan Nasional					kelompok UPPKS
Pelayanan Serentak	Terlaksananya pelayanan KB serentak	Bukittinggi	5 kali	33.680.000	APBD	Peningkatan peserta KB baru
Pemberian Penghargaan KB Teladan	Pemenang lomba dan penghargaan KB teladan	Bukittinggi	10 jenis,	54.460.000	APBD	Untuk peningkatan motivasi kerja para pengelola Program KB/KS
Jambore PLKB Tingkat Nasional	Terikutinya kegiatan jambore PLKB tingkat Nasional	Luar Bukittinggi	10 orang	0	APBD	Meningkatkannya wawasan dan pemahaman PLKB Kota Bukittinggi tentang Program KB Nasional
Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK	Bantuan operasional/transportasi PPKBK, sub PPKBK dan Kader BKB, BKR dan BKL	Bukittinggi	928 org	362.645.000	APBD	Adanya bantuan transportasi PPKBK dan Sub PPKBK
Pelaksanaan Harganas kota, prop dan nasional	peringatan hari keluarga Nasional tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	Bukittinggi/ Luar Bukittinggi	3 kegiatan	116.570.000		Peringatan harganas
Pendampingan Kelompok UPPKS	Terlaksananya pendampingan pembinaan bagi kelompok UPPKS	Luar Bukittinggi	2 kali	17.680.000	APBD	Adanya pendampingan Kelompok UPPKS

Fasilitasi koordinasi lapangan PLPKB	Terbentuk Kampung KB	Bukittinggi	5 kampung KB	83.247.000	APBD	Pembentukan kampung KB
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan KB (DAK 2016)	Tersedianya sarana dan prasarana klinik, PIK R, sarana kerja PLKB, pagar balai penyuluh	Bukittinggi	Genre Kit 1 set, Obgyn bed 2 unit, IUD Kit dan sterilisator elektrik 3 set, 11 unit smart phone, PC 4 unit, media KIE lini lapangan 9 paket, pagar balai penyuluh KB, 1552 lembar KKA	355.570.000	DAK	
Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2016)	Tersedianya operasional Balai penyuluh dan Alat Kontrasepsi di klinik KB	Bukittinggi	3 balai penyuluh dan 12 klinik KB	143.280.000	DAK	
DAK Bidang KB (Sisa DAK 210 – 2014)		Bukittinggi		1.790.894.161	DAK	
DAK Bidang KB (Sisa DAK 2105)		Bukittinggi		8.460.000	DAK	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja				216,245,650		
Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Terlaksananya pelatihan KRR bagi pendidik sebaya dan konselor	Bukittinggi	132 org	46.890.000	APBD	Siswa SLTA

	sebaya tingkat Kota					
Pemilihan duta mahasiswa Genre Tk. Kota Bukittinggi	Terpilihnya 1 pasang Duta Mahasiswa Genre dan Ayah Bunda Genre	Bukittinggi	2 Pasang	121.100.000	APBD	
Pelatihan KRR bagi Guru BK dan OSIS Tingkat SLTA terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS	Terlaksananya pelatihan KRR bagi guru BK dan pengurus PIK remaja Tk.SLTA	Bukittinggi	4 angkatan	48.255.650	APBD	Guru BK dan OSIS SLTA mmahami bahaya terhadap narkoba dan HIV/AIDS
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat				214,518,000		
Penunjang operasional peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Insentif untuk kader dan pengelola, tenaga medis dan peserta KB	Bukittinggi	500 kasus	54.130.000	APBD	
Orientasi Petugas Pendataan Keluarga	Terlaksananya pendataan Keluarga	Bukittinggi	1 kali	7.428.000	APBD	
Penunjang kegiatan pendataan keluarga	Terlaksananya pendataan Keluarga	Bukittinggi	1 kali	38.700.000	APBD	
Verifikasi pendataan kependudukan dan KB dan data terpilah	Data dari hasil pendataan keluarga lebih akurat	Bukittinggi	1 kali			
Pengendalian kuantitas penduduk	Adanya data dan analisa kependudukan tahun 2016	Bukittinggi	1 Dok	114.260.000	APBD	

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				170,995,300		
Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi Pengurus KB dan penunjang kegiatan petugas pendataan	Terlaksananya orientasi petugas pendataan keluarga tahun 2016	Bukittinggi	1 kali	18.743.300	APBD	Kader yang terlatih KRR di tingkat lini lapangan
Sarasehan pendataan keluarga	Terlaksananya sarasehan hasil pendataan keluarga	Bukittinggi	1 kali	29.000.000	APBD	hasil pedataan
Bimbingan terpadu program PPKB	Terlaksananya kegiatan bimbingan terpadu program pemberdayaan perempuan, kependudukan dan KB	Bukittinggi	8 kali	33.252.000	APBD	Bindu PPKB
Non Urusan				625,790,300		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				459,940,300		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos, materai, perangko, dan buku cek	Bukittinggi	210.14	3,650,000	APBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon, air dan listrik	Bukittinggi	12 bulan	17,600,000	APBD	
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Service computer, laptop, printer, mesin tik	Bukittinggi	9 laptop, 4 printer, 2 mesin tik, 3 komputer	6,450,000	APBD	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang, service dan BBM, pajak kendaraan	Bukittinggi	3 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2	122,321,200	APBD	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan dan bahan pembersih serta retribusi persampahan	Bukittinggi	27 macam	5,136,500	APBD	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Bukittinggi	195	7,500,000	APBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak penggandaan	Bukittinggi	6 macam	12,000,000	APBD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Bukittinggi	7 macam	3,288,000	APBD	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Nasi bungkus, snack	Bukittinggi	Makan dan minum	16,400,000	APBD	
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	184,731,300	APBD	
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	tenaga administrasi dan jaga malam	Bukittinggi	2 orang	67,180,000	APBD	
Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi kantor	spanduk	Bukittinggi	3 spanduk	750,000	APBD	
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan	Honor pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan	Bukittinggi	100 %	8,800,000	APBD	

Barang dan Jasa Pemerintah						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				140,950,000		
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Gambar Kepala Negara dan daerah	Bukittinggi	Foto Presiden/ Wakil, Gubernur/ Wakil, Walikota/ Wakil	300,000	APBD	Tersedian ya Foto Pimpinan
Pengadaan peralatan kantor	2 printer, 1 unit laptop, 1 mesin tik, 2 mesin penghancur kertas, 1 unit CCTV, 2 air cooler dan meubeleur	Bukittinggi	2 printer, 1 laptop, 1 mesin tik, 2 mesin penghancur kertas, 1 unit CCTV, 2 aircooler dan meubeleur	85,650,000	APBD	Tersedian ya printer, laptop, mesin tik, mesin penghancur kertas, CCTV
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengecatan, ruang luas, parkir tertib dan kanopi (atap parkir)	Bukittinggi	Gedung kantor bersih dan rapi	55,000,000	APBD	gedung kantor bersih
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				19,800,000		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas harian	Bukittinggi	44 org	19,800,000	APBD	tersedia pakaian dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD				5,100,000		
Penyusunan Laporan Capaian	Laporan LAKIP 1 tahun	Bukittinggi	1 dokumen	2,100,000	APBD	Adanya LAKIP

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Bukittinggi	2 buku	1,500,000	APBD	Adanya Laporan keuangan semester
Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Buku renja dan keuangan SKPD	Bukittinggi	1 buku	1,500,000	APBD	Adanya renja dan keuangan SKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, usulan program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Perempuan

- a. Penanganan ekonomi perempuan secara nyata, mulai dari potensi kelompok kecil perempuan pelaku ekonomi di kelurahan sampai kepada Perempuan pelaku ekonomi yang sudah tangguh, untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi perempuan, dan memberi ruang kepada perempuan industri rumahan
- b. Pencegahan Trafiking bagi perempuan marginal
- c. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan
- d. Peningkatan akses perempuan untuk berkumpul dan berorganisasi sesuai potensi dan fitrah perempuan
- e. Perlindungan Perempuan terutama pada posisi keadilan hukum apabila terjadi perceraian, baik pembagian harta gona gini, dan hak asuh anak
- f. Peningkatan upaya pemenuhan quota 30 % perempuan politik yang duduk di legislative
- g. Peningkatan kualitas perempuan pada pola asuh anak
- h. Peningkatan kualitas perempuan untuk menjamin kualitas keluarga
- i. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan untuk menekan angka kematian Ibu

- j. Pelaksanaan kegiatan peringatan hari – hari besar perempuan

2. Perlindungan Anak

- a. Pemenuhan 24 indikator Hak Anak, terutama penanganan usia sekolah, penanganan jaminan kesehatan terbaik anak , jaminan akte kelahiran, dan penghindaran dari eksploitasi anak sebagai pencari nafkah utama keluarga
- b. Perlindungan Khusus Anak menjamin setiap anak dapat hidup secara wajar , nyaman dan dapat mencapai cita – cita dimasa depan mereka
- c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas forum anak daerah , satuan Tugas dan kelompok anak lainnya yang di dukung semua pihak
- d. Peningkatan keikut sertaan dunia usaha terhadap jaminan Hak Dasar Anak
- e. Peningkatan kualitas dan strata Kota Layak Anak
- f. Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap anak
- g. Ketersediaan Rumah Aman
- h. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional

Sedangkan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana usulan program dan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan Program Pengendalian Penduduk melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. Peningkatan SDM PPKBK dan Sub PPKB , untuk menjamin hasil yang lebih baik
- c. Peningkatan jaminan Data Kelurga yang lebih akurat
- d. Kemudahan akses pelayan KB
- e. Peningkatan kualitas Kelompok Kegiatan antara lain UPPKS dan Tribina, termasuk PIKR/M
- f. Peningkatan kualitas melalui Program Genre, sehingga benar – benar tercapai norma hidup keluarga kecil bahagia sejahtera
- g. Penguatan modal usaha dan kerjasama usaha

- h. Peningkatan peran mitra kerja seperti Koalisi kependudukan dan asosiasi Kelompok UPPKS
- i. Peningkatan pelayanan ketersediaan alat kontrasepsi
- j. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan IPeKB, IBI, Bayangkara, TNI dan TP PKK
- k. Peningkatan kualitas Kampung KB
- l. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana penunjang program KKBPK
- m. Peningkatan Kualitas PLKB
- n. Peningkatan layanan Balai Penyuluhan KB
- o. Peningkatan Pengetahuan Remaja terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja
- p. Peningkatan Pengetahuan Remaja terhadap akibat Narkoba, HIV Aids
- q. Peningkatan pengetahuan remaja terhadap penyiapan kehidupan berumah tangga bagi remaja.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pengembangan pelayanan yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG & A) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya bidang sosial, politik, hukum, perekonomian dan pemenuhan hak-hak anak.
- b. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG & A) oleh Pemerintah Daerah, khususnya bidang sosial, politik, hukum, perekonomian dan pemenuhan hak-hak anak.
- c. Perumusan kebijakan perlindungan anak dan perempuan.

Dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meliputi :

- a. Penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan.
- b. Penetapan parameter penduduk.
- c. Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data informasi.
- d. Pengendalian penduduk dan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peserta KB.
- e. Pembangunan keluarga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P3APPKB

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi:

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.
		Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak.
2	Terkendalinya Jumlah penduduk	Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana.
		Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk.

3.3 Program dan Kegiatan

Program.

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
 - a. Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak
 - b. Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)
 - c. Pelayanan dan Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
 - b. Penguatan Persiapan APE dan PUG PP
 - c. Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi
 - d. Penguatan kelembagaan PUG
 - e. KIE tentang kesetaraan dan keadilan Gender

- f. Penyusunan Informasi Gender dan Anak
- 3. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan
 - a. Peningkatan Produktifitas Perempuan melalui Pelatihan/Bimbingan dan Pameran Dalam dan Luar Daerah
 - b. Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak Pidana kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi dan trafiking
 - c. Pembinaan Perempuan dalam peningkatan kualitas keluarga
- 4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
 - a. Peringatan Hari Ibu.
 - b. Peningkatan Peran organisasi perempuan (GOW).
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 5. Program Keluarga Berencana
 - a. Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan konseling program KB/KS
 - b. Manunggal KB Kesehatan
 - c. Pelayanan KB Serentak dan komplikasi
 - d. Pemberian penghargaan KB Teladan
 - e. Penunjang operasional peserta KB IUD, IMPLANT dan Kader KB
 - f. Fasilitasi Koalisi Kependudukan
 - g. Fasilitasi/Pelaksanaan Kampung KB
 - h. Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK dan Kader Poktan
 - i. Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Kota, prop dan Nasional
 - j. Fasilitasi lapangan program KKBPK
 - k. Pelatihan motivator MOP bagi peserta KB Pria

- l. Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non fisik)
- m. Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh KB (DAK)
- n. DAK bidang KB (sisa DAK 2010 – 2015)
- o. Penyelenggaran Bimbingan terpadu Program KKBPK
6. Program kesehatan reproduksi remaja.
 - a. Pelatihan KRR bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya
 - b. Fasilitasi Program Generasi Berencana
7. Program Pelayan Kontrasepsi
 - a. Penunjang operasional Klinik KB
8. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 - a. Kancan Bakti Saka Kencana
9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga
 - a. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan POKTAN
10. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air listrik dan telepon
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan Alat tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman

- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar kota Bukittinggi.
 - l. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS.
 - m. Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor.
 - n. Pelaksanaan Proses administrasi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
11. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- a. Pengadaan peralatan kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Pembuatan Pagar Kantor
 - d. Pembuatan Canopy bagian luar kantor
12. Program Peningkatan Disiplin aparatur
- a. Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional KB
13. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
 - d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA BUKITTINGGI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					TOTAL BELANJA LANGSUNG				5,489,807,736	APBD			6,446,801,083
1					WAJIB				4,648,013,212	APBD			5,436,647,654
					NON URUSAN				841,794,524	APBD			1,010,153,429
1	02	02			URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,871,968,500	APBD			3,446,362,200
1	02	02	1	02	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan		persentase penurunan kasus KDRT dan TPPO		451,871,300	APBD			542,245,560

					Kualitas Anak dan Perempuan								
1	11	1.11.01.	15	01	Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)		Terlaksananya Lomba dan Peringatan Hari Anak Nasional	4 Lomba dan 1 peringatan HAN	129,873,000	APBD		4 Lomba dan 1 peringatan HAN	155,847,600
					Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak		Peningkatan jumlah kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan meningkatkan jumlah fasilitas bermain dan kreatifitas ramah anak.	4 kelurahan, 7 Puskemas, 7 sekolah, 4 sfasilitas bermain dan draft KLA	126,042,500	APBD		6 kelurahan, 7 Puskemas, 9 sekolah, 5 sfasilitas bermain dan Perda KLA	151,251,000
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan tentang KDRT dan TPPO		Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisas	400 Orang	69,300,800	APBD		400 Orang	83,160,960
					Sosialisasi & Advokasi Perlindungan Khusus Anak		Jumlah peserta sosialisasi	25 Stakeholders	76,230,000	APBD		30 Stakeholders	91,476,000
					Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak		Terpenuhinya hak Perlindungan Khusus Anak	50 Anak	50,425,000	APBD		55 Anak	60,510,000
1	11	1.11.01.	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan		666,561,600	APBD			799,873,920

1	11	1.11.01.	16	01	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak korban dan rentan KDRT	30 Org Pengurus dan relawan, 20 kasus terlayani serta 1 Sekretariat P2TP2A	249,798,000	APBD		30 Org Pengurus dan relawan, 22 kasus terlayani	299,757,600
					Fasilitasi pengembangan dan perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA)	Jumlah pengurus FORDA yang didampingi, mengikuti peringatan HAN	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	80,061,000	APBD		7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	96,073,200
					Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya	Tersedianya data pendukung dan penilaian APE	1 Dokumen dan penilaian	49,439,000	APBD		1 Dokumen dan penilaian	59,326,800
					Penguatan dan pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP bidang Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi mitra PUG PP	1 Organisasi	32,230,000	APBD		1 Organisasi	38,676,000
					Penguatan vokal point PUG	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan	100 orang	32,155,000	APBD		100 orang	38,586,000

				Penyusunan informasi Gender Dan Anak		adanya profil gender dan anak	1 Dokumen	195,941,000	APBD		1 Dokumen	235,129,200
				KIE tentang kesetaraan dan keadilan Gender		KIE Kesetaraan & Keadilan gender	4 kali	26,937,600	APBD		4 kali	32,325,120
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				398,996,100	APBD			478,795,320
				Peningkatan Produktifitas perempuan melalui pelatihan/bimbingan dan pameran dalam dan luar Daerah		Jumlah Perempuan yang di KIE, dilatih dan Pameran yang dilaksanakan	90 Orang	119,310,000			100 Orang	143,172,000
				Forum Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi, dan trafiking		Pertemuan teknis jejaring kelembagaan danFGD	4 kali pertemuan, 6 kali FGD	81,792,400	APBD		4 kali pertemuan, 6 kali FGD	98,150,880
				Peningkatan ekonomi perempuan melalui industri rumahan		50 % ekonomi perempuan pelaku industri rumahan meningkat	IR Strata I	152,640,000	APBD		IR Strata 2	183,168,000
				Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga		Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	1 Kegiatan, 75 orang	45,253,700	APBD		1 Kegiatan, 75 orang	54,304,440

1	11	1.11.01.	18		Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.		Persentase penurunan kemiskinan		1,354,539,500	APBD			1,625,447,400
					Peringatan Hari Ibu		lomba dan peringatan hari ibu	2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	143,256,000	APBD		2 Lomba dan 1 Hari Puncak Peringatan Hari Ibu	171,907,200
					Peningkatan Peran organisasi perempuan/organisasi masyarakat (GOW)		Jumlah organisasi perempuan yang aktif	25 Organisasi	177,159,000	APBD		30 Organisasi	212,590,800
					Pembinaan tokoh perempuan inspiratif (Pembentukan dan Pembinaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bukittinggi		terbentuk / terfasilitasi KPPI	1 Organisasi, 100 org perempuan politik	27,280,000	APBD		1 Organisasi, 100 org perempuan politik	32,736,000
					Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		PKK yang dibina, Jambore Kota yang dilaksanakan, Lomba PKK, Jambore Tingkat Propinsi yang dilaksanakan	3 Kecamatan, 4 Lomba, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan	888,279,750	APBD		3 Kecamatan, 4 Lomba, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan	1,065,935,700
					Perkuatan organisasi dharmawanita persatuan kota bukittinggi		Meningkatnya Peran serta Dharma Wanita Dalam Pembangunan	1 Organisasi DW	118,564,750	APBD		1 Organisasi DW	142,277,700

12		1.11.01.			URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			1,776,044,712	APBD			1,990,285,454
					Program Keluarga Berencana		Jumlah PUS ber KB	1,515,330,212	APBD			1,697,208,254
					Pelayanan KIE / Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS		Terlaksananya KIE /teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik	24 kali KIE, 12 kali liputan, cetak, 1 kali liputan elektronik	64,141,300	APBD	24 kali KIE, 12 kali liputan, cetak, 1 kali liputan elektronik	76,969,560
					Manunggal KB/Kesehatan		Terlaksanya Manunggal KB/Kesehatan	5 keg manunggal 1 65 % PA dari PUS Th ybs, unmetnee d 13 %	49,849,500	APBD	5 keg manunggal 1 65 % PA dari PUS Th ybs, unmetnee d 13 %	59,819,400
					Pelayanan KB serentak dan komplikasi		Jumlah Peserta KB	1850 orang	35,940,000	APBD	1900 orang	43,128,000

				Pemberian penghargaan KB Teladan		Perlombaan yang dilaksanakan	10 jenis lomba	108,205,000	APBD		10 jenis lomba	129,846,000
				Perkuatan koalisi kependudukan		Buku analisa kependudukan	1 Dokumen	160,187,512	APBD		1 Dokumen	192,225,014
				Pembuatan grand design pengendalian kualitas penduduk		Perserta sosialisasi Grand Design kependudukan	1 Dokumen	66,130,000	APBD			0
				Penunjang Operasional PPKBK , sub PPKBK dan kader Poktan		Pemberian honorarium PPKBK dan SUB PPKBK serta kader	390 PPKBK, sub PPKBK, dan poktan	448,936,000	APBD		390 PPKBK, sub PPKBK, dan poktan	538,723,200
				Pelaksanaan harganas kota, propinsi, dan nasional		Pelaksanaan hari keluarga Nasional Tingkat kota, propinsi, dan nasional	3 Kali	123,010,000			3 Kali	147,612,000
				Jambore IMP		Jambore yang dilaksanakan	1 Kali	54,132,000	APBD		1 kali	64,958,400
				Fasilitasi Lapangan Program KKBPK		Jambore kader IMP dan PLKB terpadu	36 orang	59,244,900	APBD		40 orang	71,093,880

				fasilitasi / Pelaksanaan kampung KB		kampung KB yang dibina	5 Kampung KB	58,075,000	APBD		8 Kampung KB	69,690,000
				Penunjang Kegiatan updating pendataan keluarga		Tersedianya penunjang pendataan keluarga	100% Jmlh KK	75,235,000	APBD		100% Jmlh KK	90,282,000
				Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi Pengurus KB		Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan	90% dari cakupan blanko laporan Dalap	22,910,000	APBD		93% dari cakupan blanko laporan Dalap	27,492,000
				Penunjang Operasional Peserta KB IUD , Implant dan Kader KB		Jumlah Peserta KB baru MKJP	1.598 kasus	127,840,000	APBD		1.598 kasus	153,408,000
				Orientasi petugas updating pendataan keluarga		Peserta orientasi pendataan keluarga	189 IMP/Petu gas Updating	0	APBD		189 IMP/Petu gas Updating	0
				promosi gelanggang dagang kelompok UPPKS		Pameran dagang yang dilaksanakan	3 kali	53,460,000			3 kali	
				Sarasehan hasil Pendataan/updating data Keluarga		Saresehan hasil 2017	90 % dari cakupan Data basis hasil pendataan /updating data keluarga	0	APBD		90 % dari cakupan Data basis hasil pendataan /updating data keluarga	0

					Penyelenggaraan bimbingan terpadu Program KKBPK		Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK	12 kali	0	APBD		12 kali	22,320,000
					Orientasi motivator MOP bagi peserta KB pria		Jumlah Orientasi motivator	30 Orang	8,034,000	APBD		30 Orang	9,640,800
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja				159,094,000	APBD			190,912,800
					Pelatihan KRR bagi PS/KS		Peserta pelatihan KRR bagi pendidik sebaya dan konselor sebaya	132 siswa	36,542,000	APBD		132 siswa	43,850,400
					Pelatihan KRR bagi Kepala Sekolah dan guru pembina PIK R/M		Peeserta pelatihan KRR bagi kepala sekolah dan guru	110 Orang	19,895,000	APBD		135 orang	23,874,000
					Fasilitasi Program Generasi Berencana		Pemilihan duta pelajar/mahasiswa genre,pengayom motivator dan kreator genre	54 orang, 3 kali	102,657,000	APBD		54 orang, 3 kali	123,188,400
					Program Pelayanan Kontrasepsi				0	APBD			21,600,000
					Penunjang operasional klinik KB		Klinik KB yang berfungsi	25 klinik KB	0	APBD		25 klinik KB	21,600,000
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				67,137,000	APBD			80,564,400

				Kancah Bhakti Saka Kencana		Peserta yang mengikuti Saka bhakti Kencana	35 orang	67,137,000	APBD		40 orang	80,564,400
				Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				34,483,500	APBD			0
				Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan POKTAN		Jumlah POKTAN yang dibentuk dan didampingi	24 Kel	34,483,500			24 Kel	
0	0	1.11.01.		NON URUSAN				841,794,524	APBD			1,010,153,429
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		627,429,024	APBD			752,914,829
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai,buku cetak dan benda pos lainnya	12 Bulan	4,050,000	APBD		12 Bulan	4,860,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		Rekening telepon,air dan listrik	12 Bulan	42,200,000	APBD		12 Bulan	50,640,000
				Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	6,450,000	APBD		100%	7,740,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		suku cadang,service dan BBM serta pajak kendaraan	5 kendaraan R 4, 27 R 2	235,248,000	APBD		5 kendaraan R 4, 27 R 2	282,297,600
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	22 Macam	45,403,600	APBD		22 Macam	54,484,320

				Penyediaan Alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor	31 Macam	7,968,200	APBD		31 Macam	9,561,840
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Macam	13,078,500	APBD		6 Macam	15,694,200
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalansi listrik	7 Macam	1,499,500	APBD		7 Macam	1,799,400
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedia peralatan RT	100%	2,587,000	APBD		100%	3,104,400
				Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan Minum	100%	19,140,000	APBD		100%	22,968,000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah		Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 Bulan	150,000,000	APBD		12 Bulan	180,000,000
				Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS		Tenaga administrasi, jaga malam dan supir	3 orang	85,754,224	APBD		3 orang	102,905,069
				Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor		Spanduk	100%	1,750,000	APBD		100%	2,100,000
				Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Honor pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan	7 orang	12,300,000	APBD		7 orang	14,760,000
									APBD			
				Program peningkatan sarana		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		195,000,000	APBD			234,000,000

					dan prasarana aparatur								
					Pengadaan Peralatan Kantor		Printer,mesin penghancur kertas ,brankas,mebeulair	100%	45,000,000	APBD		100%	54,000,000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung kantor yang nyaman	100%	150,000,000	APBD		100%	180,000,000
										APBD			
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0				
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya				0				
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12,948,100	APBD			15,537,720
					Penilaian angka kredit		Terlaksananya Penilaian kredit petugas PLKB	11 Orang	12,948,100	APBD		11 Orang	15,537,720
										APBD			
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD		meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan Keuangan		6,417,400	APBD			7,700,880

				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Laporan capaian kinerja dan keuangan	1 Dokumen	1,500,000	APBD		1 Dokumen	1,800,000
				Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun		Laporan keuangan akhir tahun berjalan	1 Dokumen	1,177,400	APBD		1 Dokumen	1,412,880
				Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD		Tersusunnya Renja dan Keuangan	1 Dokumen	1,700,000	APBD		1 Dokumen	2,040,000
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedinya LAKIP	1 Dokumen	2,040,000	APBD		1 Dokumen	2,448,000

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB

K E P A L A,



TATI YASMARNI, SE.MM
NIP. 19630629 198302 2 00 1

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dan diharapkan dapat diakui sebagai acuan dalam melakukan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja ini telah dikoordinasikan dengan seluruh Bidang dan sekretariat Dinas sebagai interpretasi program dan kegiatan masing-masing bidang dan Sekretariat Dinas

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan serta kelemahannya.

Kiranya Rencana Kerja ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi untuk urusan Pengarus utamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Mohon maaf jika terdapat segala kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian Rencana Kerja ini.

Bukittinggi, Agustus 2017

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, SE.MM
NIP.196306291983022001